



TAHUN 2023

RENCANA KERJA



☎ (022) 665 1001

✉ bkpsdmd@cimahikota.go.id

🌐 <https://bkpsdmd.cimahikota.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 yang merupakan dokumen rencana pembangunan BKPSDMD Kota Cimahi untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang penyusunannya berpedoman pada Renstra BKPSDMD dan rancangan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, serta isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan. Tujuan penyusunan Rencana Kerja BKPSDMD Kota Cimahi Tahun 2023 ini adalah sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai visi dan misi Kota Cimahi.

Mudah-mudahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini dapat bermanfaat untuk menjadi rujukan serta pedoman bagi jajaran BKPSDMD Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas.

Cimahi, Juli 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**



Drs. HERRY ZAINY. Z, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196303091989031008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan BKPSDMD untuk periode 1 (satu) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BKPSDMD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi. Renja ini berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja BKPSDMD memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Rencana Kerja BKPSDMD ini adalah sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 dan Renstra BKPSDMD 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai Visi Jangka Menengah Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi mengacu pada Rancangan Awal RKPD Pemerintah Kota Cimahi. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2023.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengemukakan bahwa Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2023-2026 yang akan dilaksanakan jangka waktu 1 (satu) tahun, dimana fungsi Renja SKPD adalah menerjemahkan dan mengoperasionalkan RKPD ke dalam Program dan Kegiatan, sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tertuang dalam

Renstra SKPD serta sebagai pedoman proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi dasar dalam proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
17. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita daerah Nomor 139);
 18. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 660, Tambahan Berita daerah Nomor 140);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 disusun dengan maksud adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.
2. Memberikan acuan dan gambaran selama satu tahun ke depan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKPSDMD pada Tahun 2023.
3. Sebagai parameter pelaksanaan kegiatan BKPSDMD Tahun 2023 untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap program dan kegiatan.
4. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja BKPSDMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah untuk memetakan kebutuhan perencanaan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada dapat dikelola secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penyampaian rencana kerja maka sistematika penulisan Rencana Kerja BKPSDMD Kota Cimahi Tahun 2023 sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKPSDMD TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDMD Kota Cimahi Tahun 2021 dan Capaian Renstra BKPSDMD Tahun 2023-2026
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD Kota Cimahi
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Perumusan Kegiatan Prioritas

IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDMD TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDMD Tahun 2021 dan Capaian Renstra BKPSDMD pelaksanaan Tahun 2021. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ini ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan BKPSDMD selaku Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dimana informasi hasil evaluasi tersebut akan digunakan untuk menentukan strategi dan kegiatan Rencana Kerja BKPSDMD Tahun 2023.

Evaluasi atau reviu akan dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan BKPSDMD Tahun 2021 dan realisasi target sasaran Renstra BKPSDMD Tahun 2021. Selain itu juga akan dilakukan reviu terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2022 semester I dan proyeksi realisasi anggaran tahun 2022.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi pada Tahun 2021 melaksanakan 4 (empat) program yang terurai dalam 30 kegiatan dengan predikat kinerja sangat tinggi yaitu 89,76% dengan kinerja keuangan sebesar 85,99%. Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Evaluasi Terhadap Hasil Renja BKPSDMD Kota Cimahi Periode Pelaksanaan 2021

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/ Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Uang	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				9	10	11	12					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13
BIDANG URUSAN : KEPEGAWAIAN												
PROGRAM: PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH												
(1) Nilai Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (2) Persentase disiplin ASN (3) Persentase jenjang pendidikan terakhir ASN (4) Persentase kinerja ASN												
KEGIATAN: Mutasi dan Promosi ASN			656.495.000		239.639.000		36,50					
(1) jumlah laporan penyelenggaraan mutasi dan promosi ASN	(1) 2	(1) Laporan		(1) 2		(1) 100						BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			50.000.000		38.659.000		77,32					
Jumlah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	600	Surat Keputusan		504		84,00						BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Mutasi ASN			20.000.000		8.813.500		44,07					
Jumlah PNS yang mengikuti proses mutasi keluar	20	Orang		31		155,00						BKPSDMD
Jumlah Surat Keputusan penempatan PNS dalam jabatan pelaksana	500	Surat Keputusan		584		116,80						BKPSDMD
Jumlah kegiatan assesment mutasi pegawai	1	Kegiatan		0		-						BKPSDMD
Jumlah PNS yang mengikuti proses mutasi masuk	70	Orang		42		60,00						BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Promosi ASN			586.495.000		192.166.500		32,77					
Jumlah Pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan dalam jabatan struktural/fungsional;	6	Kegiatan		5		83,33						BKPSDMD
Jumlah Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	2	Kegiatan		0		-						BKPSDMD
Jumlah rapat baperjakat	5	Kegiatan		3		60,00						BKPSDMD
Jumlah pelaksanaan assesment pejabat struktural	1	Kegiatan		1		100,00						BKPSDMD
KEGIATAN: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1.109.013.000		1.062.766.526		95,83					
(1) Jumlah ASN yang pensiun (2) Jumlah data ASN yang dikelola (3) Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN	(1) 200 (2) 4400 (3) 1	(1) Orang (2) Orang (3) Kegiatan		(1) 177 (2) 12585 (3) 0		(1) 88.5 (2) 286.02 (3) 0						BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			719.500.000		706.226.303		98,16					
Jumlah Peserta yang diangkat menjadi Calon ASN	610	Orang		329		53,93						BKPSDMD
Jumlah Kegiatan Seleksi ASN	3	Kegiatan		3		100,00						BKPSDMD
Jumlah kegiatan pemberkasan calon ASN	2	Kegiatan		1		50,00						BKPSDMD
Jumlah kegiatan pembekalan calon ASN	2	Kegiatan		0		-						BKPSDMD
Jumlah CPNS yang mengikuti pemeriksaan kesehatan	98	Orang		98		100,00						BKPSDMD
Jumlah dokumen evaluasi pengadaan ASN	1	Dokumen		1		100,00						BKPSDMD

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/ Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Uang	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun ... (%)		Unit PD Penanggung Jawab
SUB KEGIATAN: Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			65.600.000		40.098.000		61,13					
Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	200	Surat Keputusan		215		107,50						BKPSDMD
Jumlah PNS Calon Purnabakti yang mengikuti pembekalan	0	Orang		0		-						BKPSDMD
Jumlah Surat KGB yang diterbitkan	1600	Surat		2176		136,00						BKPSDMD
Jumlah penyelenggaraan kegiatan satu atap pensiun	1	Kegiatan		1		100,00						BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Data Kepegawaian			152.000.000		145.415.423		95,67					
Jumlah PNS yang datanya tersedia dan terpelihara dalam Aplikasi SAPK dan SIMPEG sesuai kebutuhan	4250	Orang		4071		95,79						BKPSDMD
Jumlah Peserta Rakor Data Kepegawaian	35	Orang		35		100,00						
Jumlah waktu langganan cloud goggle data pegawai	2	Bulan		2		100,00						
Jumlah penyelenggaraan pemutakhiran data mandiri ASN	1	Kegiatan		1		100,00						
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			168.513.000		167.826.800		99,59					
Jumlah pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian yang ada di lingkungan BKPSDMD	4	Aplikasi		4		100,00						BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			3.400.000		3.200.000		94,12					
Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan dan Formasi ASN	1	Dokumen		1		100,00						BKPSDMD
KEGIATAN: Pengembangan Kompetensi ASN			140.050.000		132.766.000		94,80					
(1) Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi ASN	(1) 6	(1) Kegiatan		(1) 6		(1) 100,00						BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			64.500.000		60.394.000		93,63					
Jumlah PNS yang Izin Belajar;	80	Orang		85		106,25						BKPSDMD
Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar;	20	Orang		10		50,00						BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			75.550.000		72.372.000		95,79					
Jumlah fasilitasi pelaksanaan PORPEMDA	1	Kegiatan		0		-						BKPSDMD
Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas;	50	Orang		57		114,00						BKPSDMD
Jumlah Pelaksanaan Rakor penguatan/Evaluasi HCC;	1	Kegiatan		0		-						BKPSDMD
Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan (Pengajian Rutin);	1	Kegiatan		1		100,00						BKPSDMD
KEGIATAN: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			103.741.000		82.576.500		79,60					
(1) Presentase ASN yang melaporkan penilaian kinerjanya	(1) 94.28	(1) Persen		(1) 54.51		(1) 57.82						BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			4.057.000		3.031.400		74,72					
Jumlah ASN yang melaporkan pengelolaan dan pelaporan E-SKP;	4250	Orang		3557		83,69						BKPSDMD
Jumlah sosialisasi mekanisme penilaian kinerja pegawai	1	Kegiatan		1		100,00						BKPSDMD

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/ Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Uang	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun (Akhir Tahun (%))	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun (%)	Unit PD Penanggung Jawab
SUB KEGIATAN: Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			13.000.000		12.300.000	94,62			
Jumlah pegawai yang mengajukan proses izin kawin cerai;	20	Orang		14		70,00			BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Pembinaan Disiplin ASN			37.284.000		28.952.100	77,65			
Jumlah PNS yang mengikuti pembinaan peningkatan disiplin pegawai;	100	Orang		40		40,00			BKPSDMD
Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi LHKPN;	6	Orang		6		100,00			BKPSDMD
Jumlah PNS yang melaporkan LHKPN	33	Orang		33		100,00			BKPSDMD
Jumlah PNS yang mengikuti Tes Kelayakan	3	Orang		3		100,00			BKPSDMD
Jumlah PNS yang melakukan tes urine	250	Orang		233		93,20			BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			6.000.000		5.975.000	99,58			
Jumlah proses penanganan hukuman disiplin pegawai	8	Dokumen		5		62,50			BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai			43.400.000		32.318.000	74,47			
Jumlah PNS Yang Mendapatkan Penghargaan	250	Orang		412		164,80			BKPSDMD
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
(1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah (2) Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (3) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum									
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.852.180.118		11.043.003.000	79,72			
(1) Persentase Realisasi Anggaran	(1) 85	(1) Persen		(1) 41.07		(1) 48.32			BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.750.000		2.730.000	99,27			
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen		1		100,00			BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			2.800.000		2.793.100	99,75			
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17	Dokumen		17		100,00			BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.846.630.118		11.037.479.900	79,71			
Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan;	151	Orang		151		100,00			BKPSDMD
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			569.097.300		532.111.964	93,50			
(1) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	(1) 100	(1) Persen		(1) 75		(1) 75			BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			45.365.500		43.567.500	96,04			
Jumlah waktu penyediaan bahan logistik kantor	12	Bulan		9		75,00			BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			61.946.900		61.040.900	98,54			
Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan		9		75,00			BKPSDMD

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/ Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Uang	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun (Akhir Tahun (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun (%)		Unit PD Penanggung Jawab
SUB KEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.556.200		4.554.500		99,96					
Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan		9		75,00						BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			282.240.700		251.249.350		89,02					
Jumlah waktu penyediaan ATK	12	Bulan		12		100,00						BKPSDMD
Jumlah set penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6	Set		6								
Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan		12								
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			174.988.000		171.699.714		98,12					
Jumlah waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Bulan		12		100,00						BKPSDMD
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			88.690.000		73.830.850		83,25					
(1) Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	(1) 100	(1) Persen		(1) 53		(1) 53						BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			88.690.000		73.830.850		83,25					
Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3	Unit		3		100,00						BKPSDMD
Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12	Bulan		12		100,00						BKPSDMD
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			42.000.000		42.000.000		100,00					
(1) Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Disediakan	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 100						BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			42.000.000		42.000.000		100,00					
Jumlah waktu pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12	Bulan		12		100						BKPSDMD
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.796.900		11.822.069		74,84					
(1) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 100						BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5.000.000		1.091.569		21,83					
Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan		12		100,00						BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			6.596.900		6.530.500		98,99					
Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan		12		100,00						BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.200.000		4.200.000		100,00					
Jumlah waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan		12		100,00						BKPSDMD
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			42.563.000		40.509.100		95,17					
(1) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan money	(1) 29	(1) Dokumen		(1) 29		(1) 100						BKPSDMD

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/ Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Uang	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun (Akhir Tahun (%))	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun (%)	Unit PD Penanggung Jawab
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.500.000		12.155.100	97,24			
Jumlah dokumen LKIP	1	Dokumen		1		100,00			BKPSDMD
Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	2	Dokumen		2		100,00			BKPSDMD
Nilai SKM Perangkat Daerah	79	Nilai		79,83		101,05			BKPSDMD
Jumlah dokumen pengendalian Profil Resiko	2	Dokumen		2		100,00			BKPSDMD
Jumlah dokumen monev kinerja bulanan	12	Dokumen		12		100,00			BKPSDMD
Jumlah dokumen monev kinerja triwulanan	4	Dokumen		4		100,00			BKPSDMD
Jumlah laporan monev tahunan (SAKIP, RB, Stranas PK dan MCP)	4	Laporan		4		100,00			BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			30.063.000		28.354.000	94,32			
Jumlah penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	1	Kegiatan		1		100,00			BKPSDMD
Jumlah dokumen anggaran	4	Dokumen		4		100,00			BKPSDMD
Jumlah dokumen Renja	2	Dokumen		2		100,00			BKPSDMD
Jumlah dokumen Renstra	1	Dokumen		1		100,00			BKPSDMD
BIDANG URUSAN: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
(1) Persentase ASN yang memiliki Kompetensi teknis dan majerial									
KEGIATAN: Pengembangan Kompetensi Teknis			125.250.000		80.903.000	64,59			
(1) Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	(1) 127	(1) Orang		(1) 129		101,57			BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			49.650.000		24.923.000	50,20			
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis	7	Orang		9		128,57			BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			75.600.000		55.980.000	74,05			
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Bimbingan Teknis	120	Orang		120		100,00			BKPSDMD
KEGIATAN: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			856.852.000		834.938.600	97,44			
(1) Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	(1) 110	(1) Orang		(1) 102		(1) 92,73			BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			320.852.000		319.858.600	99,69			
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	12	Orang		12		100,00			BKPSDMD
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			536.000.000		515.080.000	96,10			
Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan/Latsar	98	Orang		98		100,00			BKPSDMD

Dari matrik hasil Evaluasi Terhadap Hasil Renstra BKPSDMD Kota Cimahi Periode Pelaksanaan 2021 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian rata-rata kinerja periode 2021 BKPSDMD memiliki predikat sangat memuaskan, sedangkan untuk kinerja keuangan memiliki predikat tinggi.

Berdasarkan target Indikator Kinerja Utama BKPSDMD yaitu meningkatnya Indeks Profesionalitas Pegawai yaitu 58 persen, sementara realisasi Indeks Profesional ASN tahun 2021 adalah sebesar 53,5%. Realisasi kinerja tersebut tidak sebanding dengan kinerja anggaran yang mencapai 80,59% dan kinerja program mencapai rata-rata 97,38%.

Dari hasil analisis tidak tercapainya IP ASN Kota Cimahi pada target Rencana Kerja tahun 2021 tersebut diakibatkan adanya hambatan-hambatan dan permasalahan yang dialami dalam pencapaian. Adapun permasalahan-permasalahan akibat tidak tercapainya target IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya ASN yang memiliki indeks kualifikasi dan kompetensi yang cukup telah memasuki batas usia pensiun, sehingga menurunkan indeks kualifikasi dan kompetensi Kota Cimahi secara umum.
2. Belum maksimalnya upaya peningkatan kualifikasi pendidikan ASN Kota Cimahi
3. Masih terbatasnya anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur yang mengakibatkan belum maksimalnya upaya peningkatan kompetensi ASN
4. Belum maksimalnya penyajian data kepegawaian pada aplikasi sistem informasi kepegawaian baik SIMAKCI maupun SAPK
5. Pelaporan Sasaran Kinerja Pegawai dan Prestasi Kinerja yang tidak tepat waktu.

Adapun solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah :

1. *Up date* data kepegawaian secara periodik sehingga aplikasi SiMAKCI dapat dijadikan acuan data kepegawaian yang *up to date* dan digunakan untuk mengoptimalkan pelaporan data pendukung Indeks Profesionalitas ASN.

2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka *up date* data kepegawaian beserta berkas-berkas kepegawaian lainnya.
3. Mengoptimalkan upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai melalui kegiatan Pemberian Tugas belajar dan Ijin belajar serta melakukan kerjasama dengan BKN, BKD Provinsi, BPSDM Provinsi serta Perguruan Tinggi serta menginformasikan Seminar, Workshop online/Webinar bersertifikat dalam rangka peningkatan pengembangan Kompetensi Pegawai bagi para PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
4. Optimalisasi pembiayaan untuk pelaksanaan peningkatan kompetensi teknis bagi para pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
5. Mendorong penetapan Indeks Profesionalitas ASN sebagai indikator kinerja sasaran badi seluruh Perangkat Daerah serta merilis capaian Indeks Profesionalitas ASN masing-masing Pegawai dan Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD Kota Cimahi

Dalam bidang pengelolaan sumber daya aparatur sebagai pelaksanaan kewenangan BKPSDMD Kota Cimahi, utamanya untuk meningkatkan profesional pegawai dan pelayanan kepegawaian telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut.

1. Pengiriman peserta diklat kepemimpinan, diklat teknis dan fungsional;
2. Pengiriman PNS yang melaksanakan tugas belajar serta pemberian izin belajar;
3. Penghargaan kepada pegawai berupa pelayanan kenaikan pangkat tepat waktu, terdiri dari kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
4. Fasilitasi penganugrahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya;
5. Pembekalan dan pelayanan administrasi pensiun bagi pegawai negeri sipil yang akan memasuki purna tugas.
6. Pelayanan sumber daya aparatur bagi ASN Kota Cimahi

7. Rapat koordinasi pelaksanaan Pemutakhiran data Mandiri (PDM) ASN
8. Proses seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang pengadaan PNS Tahun 2021

Selanjutnya secara umum, gambaran kinerja pelayanan pada BKPSDMD Kota Cimahi adalah menjalankan pengelolaan administrasi kepegawaian dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat administrasi di bidang manajemen kepegawaian meliputi :

- Penyusunan analisis kebutuhan, formasi dan *Bezzeting* pegawai
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai
- Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai
- Pengelolaan Mutasi Pegawai
- Pengelolaan Ijin Belajar;
- Pengelolaan Tugas Belajar
- Pemberian bantuan dana bagi PNS Tugas Belajar
- Fasilitasi Pengajuan Penerbitan Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik, Kartu Suami/ Kartu Isteri, Kartu Taspen dan BPJS Kesehatan.
- Administrasi pengajuan cuti pegawai
- Pemberian penghargaan/*reward* dan sanksi/*punishment*
- Pengurusan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
- Pengelolaan absensi berbasis *GPS*
- Administrasi Pensiun Pegawai
- Fasilitasi pengiriman PNS yang melaksanakan diklat teknis/bintek
- Pelaksanaan *Open Bidding* bagi Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD Kota Cimahi

Terdapat beberapa isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDMD Kota Cimahi yaitu :

1. Belum optimalnya kompetensi ASN
2. Belum optimalnya kualifikasi ASN
3. Kurangnya tingkat disiplin ASN
4. Belum optimalnya kinerja ASN
5. Belum optimalnya pelayanan kepegawaian

Dari identifikasi pemasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada BKPSDMD Kota Cimahi, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam rangka pengelolaan kepegawaian untuk merealisasikan dan melanjutkan program serta kegiatan. Adapun strategi yang dilakukan adalah :

- a. Peningkatan kompetensi pegawai melalui kompetensi teknis, kompetensi manajerial serta kompetensi sosial culture.
- b. Peningkatan kualifikasi pendidikan pegawai melalui pengelolaan ijin belajar dan tugas belajar
- c. Peningkatan disiplin pegawai.
- d. Peningkatan kinerja pegawai
- e. Peningkatan validitas data kepegawaian ASN Kota Cimahi.
- f. Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian

Permasalahan yang muncul akan menjadi kendala dalam mensukseskan visi dan misi Walikota Cimahi. Terutama yang terkait erat dengan urusan dan kewenangan kepegawaian Misi ke-2 yakni : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. Lebih jauh lagi tentu akan berpengaruh pada isu-isu nasional terkait dengan reformasi birokrasi.

Berdasarkan kondisi saat ini yang mewarnai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDMD Kota Cimahi, maka dapat digambarkan tantangan BKPSDMD ke depan, yaitu :

1. Rencana penyederhaan birokrasi yang telah diintruksikan oleh Pemerintah pusat.
2. Masih adanya PNS yang belum memenuhi standar kompetensi.
3. Masih rendahnya kualifikasi ASN
4. Masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS.
5. Belum optimalnya capaian target kinerja.
6. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas PNS

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Adanya pengembangan sumber daya manusia aparatur yang mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultur
2. Peningkatan kualifikasi pegawai minimal Diploma dan Sarjana
3. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap pelanggaran disiplin
4. Penyusunan sasaran kinerja dan penilaian perilaku perbulan
5. Evaluasi laporan kinerja pegawai
6. Pemberian Reward berdasarkan prestasi kerja
7. Pelayanan *Helpdesk* bagi PNS

Untuk menjawab permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan di sekitar BKPSDMD Kota Cimahi, baik itu lingkungan yang bersifat internal terdiri dari kelemahan dan kekuatan maupun eksternal, terdiri dari peluang dan ancaman.

Dari kedua analisis tersebut baik lingkungan Internal ataupun Eksternal dengan menggunakan analisis SWOT, maka uraian strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional, mandiri, berjiwa inovatif, jujur serta memiliki mental dan moral yang baik, sehingga PNS Pemerintah Kota Cimahi mempunyai kapabilitas, kredibilitas dan akuntabilitas yang tinggi melalui pelaksanaan atau fasilitasi pendidikan dan pelatihan substantif, pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.
2. Peningkatan disiplin pegawai dengan menyusun Peraturan Walikota tentang ketentuan jam kerja, evaluasi berkala terhadap pelanggaran disiplin, penerapan sanksi yang mengacu pada aturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
3. Penyusunan Sasaran Kinerja dan Penilaian Perilaku Pegawai yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022

4. Pemberian *reward* kepada pegawai berdasarkan penilaian kerja melalui aplikasi SIKACI (Sistem Informasi Kinerja ASN Kota Cimahi)
5. Penataan dan pembenahan di bidang kepegawaian secara komprehensif yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
6. Pemanfaatan teknologi informasi melalui peningkatan kemampuan aparatur dalam mendukung pemberian pelayanan publik yang prima, tepat dan cepat.
7. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada PNS dan mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas PNS dalam rangka pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.

Dari uraian strategi tersebut dapat digambarkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dalam implementasinya mempunyai peranan yang sangat penting bagi terlaksananya strategi yang telah disusun, meliputi :

1. Meningkatkan kompetensi pegawai yang profesional dan akuntabel.
2. Pemetaan pegawai sesuai kompetensi/kebutuhan kompetensi dan jabatan.
3. Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat lebih berdaya guna dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Memanfaatkan teknologi informasi, mengembangkan sistem IT yang sudah ada untuk percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendorong pelaksanaan manajemen talenta.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Renja PD

Review terhadap rancangan awal Renja PD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja. Bagian ini berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal Perangkat Daerah, termasuk dalam hal penganggaran. Tahapan rancangan awal Perangkat Daerah disajikan

dengan disertai analisis hasil kebutuhan sehingga hasilnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Review terhadap Rancangan Awal Renja PD

RANCANGAN AWAL									ANALISIS HASIL KEBUTUHAN							
Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	3				KEPEGAWAIAN							51.051.940.000	KEPEGAWAIAN			12.323.923.612
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							48.371.940.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.655.613.612
5	3	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			73.991.100
5	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	45.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah;	3 Dokumen	27.000.050				
									Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.600.500				
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.387.700				
									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.999.950				
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.003.000				
5	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan	29.999.900				

5	3	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.016.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.149.418.030
5	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang	8.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang	6.137.408.630
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.010.000
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.999.400
5	3	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			140.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50.000.000
5	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 Stel	45.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-
5	0	0	2	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-
5	3	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah			427.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			447.000.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.000.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	120.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	110.000.000

5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	43.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	42.000.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	80.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	75.000.000
5	0	0	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Paket	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Paket	12.000.000
5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	175.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	175.018.000
					Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	40.000.000	Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	46.480.600
5	3	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			125.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			46.200.000
5	0	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	46.200.000
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	25.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-

5	3	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			57.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.200.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	35.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	-
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.200.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000
5	3	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			86.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.128.120
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	86.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	85.128.120
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			3.220.000.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			2.693.960.250
5	3	2	2		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1.760.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1.249.395.450
5	0	0	2	0	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	28.000.000
					Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	900.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	853.999.900
5	0	0	2	0	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Dokumen	10.000.000	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Dokumen	9.999.700

5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	350.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	86.999.850
5	0	0	2	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	300.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	55.396.000
5	0	0	2	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	120.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	170.000.000
5	0	0	2	1	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	45.000.000
5	3	2	2		Mutasi dan Promosi ASN			1.030.000.000	Mutasi dan Promosi ASN			1.019.825.300
5	0	0	2	0	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	12 Dokumen	330.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	12 Dokumen	329.990.200
5	0	0	2	0	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	425 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	425 Dokumen	89.999.800
5	0	0	2	0	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	7 Dokumen	600.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	7 Dokumen	599.935.300

5	3	2	2		Pengembangan Kompetensi ASN			200.000.000	Pengembangan Kompetensi ASN				200.040.000
5	0	0	2 . 0 3	0	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	75.000.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	105.990.200	
5	0	0	2 . 0 3	0	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	60 Orang	75.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	60 Orang	94.050.000	
5	0	0	2 . 0 3		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	150 Orang	50.000.000	-	-	-	-	
5	3	2	2		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			430.000.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				224.599.500
5	0	0	2 . 0 4	0	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13 Dokumen	50.000.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13 Dokumen	27.500.000	
5	0	0	2 . 0 4	0	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3 Orang	60.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3 Orang	27.500.000	
5	0	0	2 . 0 4	0	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	500 Orang	60.000.000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	500 Orang	35.000.000	
5	0	0	2 . 0 4	0	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	700 Orang	200.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	700 Orang	100.000.000	
5	0	0	2 . 0 4	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	12 Dokumen	30.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Dokumen	12.500.000	
5	0	0	2 . 0 4	0	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8 Dokumen	30.000.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	8 Dokumen	17.500.000	

5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			3.566.500.000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2.160.800.000
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			3.566.500.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			2.160.800.000
5	4	2	2		Pengembangan Kompetensi Teknis			240.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis			330.000.000
5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	250.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	229.999.900
5	0	0	2	0	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	25 Dokumen	150.000.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	25 Dokumen	215.000.000
5	4	2	2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			3.326.500.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			1.830.800.000
5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 laporan	625.000.000	-	-	-	-

5	04	02	202	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	2 Dokumen	975.000.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	3 Dokumen	1.555.000.000
TOTAL								14.304.000.000	11.537.396.000			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi. Saat ini, BKPSDMD Kota Cimahi belum melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dari masyarakat umum (khalayak ramai), karena kekhususan entitas ini berhubungan dengan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi merupakan rangkuman masukan/usulan dari para pemangku kepentingan dari setiap tingkat unit organisasi, yang kemudian dikompilasi dan dianalisis oleh unit organisasi pemangku kepentingan Subbagian Program dan Keuangan. Usulan dari semua pemangku kepentingan disusun, sebagai bahan untuk didiskusikan, ditelaah secara kritis oleh semua pemangku kepentingan pengusul, dan dikonfirmasi kembali sebelum diproses menjadi rencana kerja.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan juga terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu tema pembangunan RKP Tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*) dengan tema : “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Adapun Sasaran Prioritas pembangunan tahun 2023 adalah :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau; dan
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Melihat sasaran pembangunan di atas maka sasaran peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia selaras dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang khusus membidangi manajemen sumber daya aparatur. Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi lebih spesifik yaitu dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang aparatur yaitu meningkatkan profesionalitas aparatur baik dari segi kualifikasi pendidikan, kompetensi teknis dan manajerial, kinerja dan disiplin. Serta penerapan sistem merit dalam manajemen ASN pada Pemerintah Kota Cimahi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDMD

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis BKPSDMD Tahun 2023 – 2026 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah untuk kurun empat tahun kedepan. Visi yang ingin dicapai Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah untuk tahun 2023-2026 adalah mengacu kepada visi Kota Cimahi yaitu :

“ CIMAHI KOTA CERDAS “

Sedangkan untuk misi, BKPSDMD berada dalam Misi ke-2 yakni :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik”

dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah, dalam Renstra BKPSDMD Tahun 2023-2026 telah menetapkan sasaran yaitu : Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN Kota Cimahi dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BKPSDMD.

Penetapan indeks profesionalitas ASN sebagai salah satu indikator kinerja sasaran sejalan dengan tujuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu membangun aparatur sipil negara yang profesional. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, antara lain : (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) Kinerja (target dan pencapaian); (4) Disiplin.

Selain berkomitmen membangun ASN Pemerintah Kota Cimahi yang profesional melalui perhitungan indeks profesionalitas ASN dan penerapan sistem merit, BKPSDMD Kota Cimahi juga melakukan berbagai terobosan dan upaya-upaya perbaikan guna mendukung reformasi birokrasi khususna pada area manajemen sumber daya manusia aparatur. Adapun area perubahan yang harus diintervensi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi adalah :

1. Manajemen Perubahan, yaitu terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel.

2. Penataan Tatalaksana, yaitu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
3. Penataan Organisasi, yaitu sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*
4. Penataan SDM Aparatur, yaitu SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera
5. Deregulasi Kebijakan, yaitu regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif
6. Penguatan Pengawasan, yaitu untuk meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN
7. Penguatan Akuntabilitas, yaitu untuk meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yaitu pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

BAB IV

RENCANA KERJA

DAN KERANGKA PENDANAAN

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun 2023 akan diimplementasikan melalui Program dan Kegiatan sebagai strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Kota Cimahi. Program dan kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan.

Penyusunan Rencana Kerja BKPSDMD Tahun 2023 telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi serta mengacu kepada rancangan RKPD Kota Cimahi tahun 2023 serta hasil Forum Perangkat Daerah bidang kepegawaian tahun 2022, maka dirumuskan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program dan kegiatan Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Kepegawaian Daerah

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Dari 3 Program dan 13 Kegiatan tersebut kemudian dijabarkan menjadi 41 Sub Kegiatan. Adapun matriks Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta target dapat dilihat pada tabel Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	03			KEPEGAWAIAN									9,537,396,100				12,184,990,000
5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									6,843,435,850				8,832,490,000
5	03	01	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									73,991,100				95,000,000
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BKPSDMD		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	7 Dokumen	100 persen	27,000,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	50,000,000
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BKPSDMD		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	1 Dokumen	100 persen	4,600,500		Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	0
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BKPSDMD		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	1 Dokumen	100 persen	4,387,700		Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	0
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BKPSDMD		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	1 Dokumen	100 persen	3,999,950		Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	0
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BKPSDMD		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	1 Dokumen	100 persen	4,003,000		Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	0
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BKPSDMD		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	36 Laporan	100 persen	29,999,900		Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	45,000,000
5	03	01	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									6,149,418,030				8,020,000,000
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan BKPSDMD		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	37 Orang/bulan	100 persen	6,137,408,630	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	8,000,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan BKPSDMD		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	1 Laporan	100 persen	6,010,000		Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	10,000,000	
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan BKPSDMD		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	13 Laporan	100 persen	5,999,400		Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	10,000,000	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								468,498,600				525,000,000	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum BKPSDMD		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	4 Paket	100 persen	8,000,000		Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	10,000,000	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum BKPSDMD		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	6 Paket	100 persen	110,000,000		Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	130,000,000	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum BKPSDMD		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	12 Paket	100 persen	42,000,000		Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	48,000,000	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum BKPSDMD		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	13 Paket	100 persen	75,000,000		Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	90,000,000	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum BKPSDMD		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	12 Dokumen	100 persen	12,000,000		Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	12,000,000	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum BKPSDMD		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	12 Laporan	100 persen	175,018,000		Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	200,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum BKPSDMD		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	2 Dokumen	100 persen	46,480,600	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	35,000,000
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								46,200,000			42,000,000		
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	1 Unit	100 persen	46,200,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	42,000,000
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								20,200,000			65,000,000		
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	12 Laporan	100 persen	8,200,000			Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	10,000,000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	12 Laporan	100 persen	12,000,000			Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	15,000,000
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								85,128,120			85,490,000		
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	3 Unit	100 persen	85,128,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	85,490,000
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								2,693,960,250			3,352,500,000		
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								1,249,395,450			1,660,000,000		
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		79.25 Nilai 2.12 Persen	1 Dokumen	100 persen	28,000,000			Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	79.25 Nilai 2.12 Persen	35,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		79.25 Nilai 2.12 Persen	1 Dokumen	100 persen	853,999,900	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	79.25 Nilai 2.12 Persen	1,000,000,000
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		79.25 Nilai 2.12 Persen	1 Dokumen 0 Laporan	100 persen	9,999,700	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	79.25 Nilai 2.12 Persen	25,000,000
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		79.25 Nilai 2.12 Persen	2 Dokumen	100 persen	86,999,850	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	79.25 Nilai 2.12 Persen	100,000,000
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		79.25 Nilai 2.12 Persen	1 Lembaga	100 persen	55,396,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	79.25 Nilai 2.12 Persen	300,000,000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		79.25 Nilai 2.12 Persen	1 Dokumen	100 persen	170,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	79.25 Nilai 2.12 Persen	150,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		79.25 Nilai 2.12 Persen	1 Dokumen	100 persen	45,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	79.25 Nilai 2.12 Persen	50,000,000
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN								1,019,925,300	1,150,000,000				
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN		79.25 Nilai	12 Dokumen	100 persen	329,990,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian)	79.25 Nilai	400,000,000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian)	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN		79.25 Nilai	500 Dokumen	100 persen	89,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian)	79.25 Nilai	100,000,000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN		79.25 Nilai	7 Dokumen	100 persen	599,935,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian)	79.25 Nilai	650,000,000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.0 3	Pengembangan Kompetensi ASN								200,040,000				250,000,000	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN		79.25 Nilai 2.12 Persen	60 Orang	100 persen	105,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	79.25 Nilai 2.12 Persen	90,000,000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN		79.25 Nilai 2.12 Persen	60 Orang	100 persen	94,050,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	79.25 Nilai 2.12 Persen	90,000,000
5	03	02	2.0 4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								224,599,500				292,500,000	
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Prosentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin Prosentase ASN yang melaporkan SKP	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		0.20 Persen 82.22 Persen	13 Laporan	100 persen	27,500,000		Prosentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin Prosentase ASN yang melaporkan SKP	0.20 Persen 82.22 Persen	40,000,000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Prosentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin Prosentase ASN yang melaporkan SKP	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		0.20 Persen 82.22 Persen	3 Orang	100 persen	27,499,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin Prosentase ASN yang melaporkan SKP	0.20 Persen 82.22 Persen	40,000,000
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Prosentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin Prosentase ASN yang melaporkan SKP	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		0.20 Persen 82.22 Persen	500 Orang	100 persen	39,603,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin Prosentase ASN yang melaporkan SKP	0.20 Persen 82.22 Persen	45,000,000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Prosentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin Prosentase ASN yang melaporkan SKP	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		0.20 Persen 82.22 Persen	500 Orang	100 persen	101,796,000		Prosentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin Prosentase ASN yang melaporkan SKP	0.20 Persen 82.22 Persen	125,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Prosentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin Prosentase ASN yang melaporkan SKP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		0.20 Persen 82.22 Persen	12 Laporan	100 persen	12,150,000			Prosentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin Prosentase ASN yang melaporkan SKP	0.20 Persen 82.22 Persen	17,500,000
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Prosentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin Prosentase ASN yang melaporkan SKP	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		0.20 Persen 82.22 Persen	8 Dokumen	100 persen	16,050,000			Prosentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin Prosentase ASN yang melaporkan SKP	0.20 Persen 82.22 Persen	25,000,000
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								1,999,999,900			2,220,000,000		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								1,999,999,900			2,220,000,000		
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis								444,999,900			470,000,000		
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase ASN yang memenuhi syarat Kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis		10.00 Persen	120 Orang	100 persen	229,999,900	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Prosentase ASN yang memenuhi syarat Kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan	10.00 Persen	270,000,000
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase ASN yang memenuhi syarat Kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis		10.00 Persen	25 Dokumen	100 persen	215,000,000			Prosentase ASN yang memenuhi syarat Kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan	10.00 Persen	200,000,000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								1,555,000,000			1,750,000,000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Prosentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		10.00 Persen	3 Dokumen	100 persen	1,555,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Prosentase ASN yang memenuhi syarat Kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan	10.00 Persen	1,100,000,000	
TOTAL										11,537,396,000						14,404,990,000			

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan penjabaran dari visi dan misi Rencana Strategis 2023-2026 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi tahun 2023-2026.

Dalam penyusunan Rencana Kerja BKPSDMD Kota Cimahi tahun 2023 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi tahun 2023 merupakan dasar pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun 2023 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD dan RPD Kota Cimahi.

Semoga program kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi dapat berjalan dengan baik dan terealisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KOTA CIMAHI**



Drs. HERRY ZAINY Z, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196303091989031008